

DIMENSI AGAMA DALAM PEMBANGUNAN NEGARA (KAJIAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA)

Mujiburrahman

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

mujib_net@yahoo.co.id

Abstract

Observing the current condition of the Indonesian nation has led to a phenomenon that the country is being hit by the crisis in various aspects of life. Various forms of violation and offense grow and develop in daily life of the community, such as: corruption, collusion, nepotism, and drug (narcotics) and alcohol abuse, theft, robbery and prostitution. In this country, it also begins to emerge the tenet and behavior of radicalism that disturb the community and government. On the other side, nowadays is also faced with the clash and confusion of thought of 'the contradiction between religion and the State' embedded to the young generation (millennial generation). The various social problems described above occur due to the low quality of faith and caused the decline of morality and moral degradation of this nation. It needs a fundamental and accurate solution in facing those problems. Improving and rearranging the paradigm, system and orientation of Islamic education according to its framework can be the alternative solution to solve the problems. Islamic education should be a core in the national education curriculum, so that Islamic education will have a complete transformation in people life of this state. A comprehensive and systematic transformation of Islamic education can be done through the following stages: 1) Religious education should be the core in the national education curriculum, and the substance of religious teachings should not be disputed in nation's life. 2) Religious education in schools and colleges/universities must be taught by qualified and professional teachers and lecturers, and 3) Implementation of religious education materials should fit the needs and age of learners.

Keywords: *Religion; State Development; Transformation of Islamic Education*

Abstrak

Mencermati kondisi kekinian bangsa Indonesia mengantarkan pada suatu fenomena bahwa Negara ini sedang dilanda krisis dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan keseharian masyarakat, seperti: korupsi, kolusi, nepotisme, perilaku nyabu (mengkomsumsi sabu) dan penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras, pencurian, prempokan dan prostitusi. Di negeri ini juga mulai muncul paham dan perilaku radikalisme yang mulai meresahkan masyarakat dan pemerintah. Pada bahagian lain, dewasa ini juga dihadapkan dengan adanya benturan dan kerancuan pemikiran yang ditanamkan kepada generasi muda (generasi milenial), tentang pertentangan antara agama dan Negara. Berbagai problema sosial yang digambarkan di atas terjadi karena kualitas keimanan yang rendah dan mengakibatkan kemerosotan akhlak dan degradasi moral anak bangsa. Menghadapai

problem tersebut memerlukan suatu langkah pemecahan yang mendasar dan akurat. Solusi alternatif terhadap permasalahan ini tampaknya tertuju pada upaya perbaikan dan menata ulang kembali paradigma, sistem dan orientasi pendidikan Islam sesuai dengan bingkainya. Pendidikan agama Islam harus dijadikan core dalam kurikulum pendidikan nasional, sehingga pendidikan Islam mengalami transformasi yang utuh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konprehensif dan sistematis transformasi pendidikan Islam dapat dilakukan melalui tahapan: 1) Pendidikan Agama harus dijadikan inti dalam kurikulum pendidikan nasional, dan substansi ajaran agama tidak harus dipertentangkan dalam kehidupan bernegara. 2) Pendidikan agama di sekolah dan Perguruan tinggi harus diajarkan oleh guru dan dosen yang mumpuni dan professional, dan 3) Implementasi materi pendidikan agama harus disesuaikan dengan kebutuhan dan usia peserta didik.

Kata Kunci: *Agama; Pembangunan Negara; Transformasi Pendidikan Islam*

PENDAHULUAN

Indonesia -yang sering dibanggakan sebagai bangsa besar- dewasa ini sedang dihadapkan pada berbagai persoalan dan krisis multi kompleks. Krisis tersebut menurut para pakar (pendidikan, ekonom, politisi, dan ahli hukum) diakibatkan oleh adanya kesalahan di bidang pendidikan, ekonomi, politik dan hukum.¹ Kesalahan tersebut diakibatkan kekeliruan baik pada tataran kebijakan maupun operasional pada empat bidang tersebut. Kesalahan ini lebih jauh mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya sikap dan perbuatan negatif di tengah kehidupan masyarakat. Sikap dan perbuatan negatif itu berupa kolusi, nepotisme dan korupsi yang merajalela terjadi di negeri ini, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia.²

Pada sisi lain, bangsa ini juga dihadapkan dengan tumbuh dan berkembangnya perilaku *nyabu* (mengonsumsi sabu) dan penyalahgunaan narkotika, serta minum-minuman keras. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso atau Buwas mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Indonesia yang masih darurat narkoba. Menurutnya, Indonesia dinyatakan darurat narkoba sejak tahun 1971. Ketika itu, Presiden RI ke-2 Soeharto menyatakan, Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba. "Sekarang kita lihat provinsi mana yang bebas dari narkoba, tidak ada. Kita turun ke kota-kabupaten. Kota-kabupaten mana yang bebas dari narkoba? tidak ada. Kecamatan, tidak ada yang menjamin ada kecamatan yang bebas dari narkoba. Bahkan sampai RT-RW," tegasnya.³

¹Al-Chaidar, *Reformasi Prematur, Jawaban Islam terhadap Reformasi Total*, Jakarta: Darul Falah, Jakarta, Rajab 1419 H, hal. 100-120.

²Mujiburrahman, *Urgensi Perguruan Tinggi Dalam Pembentukan Karakter Bangsa*, *Jurnal Mudarrisuna*, vol. 6, No 1, 2016, hal. 2.

³<https://regional.kompas.com/read/2017/11/02/17045461/buwas-indonesia-darurat-narkoba-sejak-1971-sampai-sekarang>

Konsekuensi logis tersebut tidak heran kalau sekarang ini menurut Komjen Pol Budi Waseso Indonesia sudah menjadi negara tujuan peredaran narkoba. Hal itu diungkapkan berdasarkan data yang ia dapat, bahwa sekitar 250 ton sabu masuk ke Indonesia setiap tahunnya. Informasi dari China, yang saya dapatkan ada seorang bandar menyebut ada 250 ton sabu masuk ke Indonesia. Saya kira, gila juga 250 ton masuk ke kita, *gimana* ceritanya. Saya sampai tanya sama bandar dari China, 'tolong ulangi lagi' dan dia berkali-kali menyampaikan 250 ton sabu ke Indonesia," ujar Budi Waseso di Jakarta, Selasa 11 Juli 2017.⁴

Di negeri ini juga sedang tumbuh dan berkembang paham radikalisme di tengah kehidupan masyarakat. Survei terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menghasilkan tiga temuan penting soal tingkat radikalisme masyarakat Indonesia. Dalam survei yang diadakan di 32 provinsi pada tahun 2017 tersebut, salah satu temuan menunjukkan potensi radikalisme masyarakat Indonesia berada di angka yang perlu diwaspadai yaitu 55,12 poin, dari rentang 0 sampai 100. "Namun, angka ini masih tergolong sedang, dari potensi kuat di angka 60,67 poin," kata Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Abdul Rahman Kadir dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo di Jakarta, Senin, 27 November 2017.⁵

Pada bahagian lain, negeri ini juga dihadapkan dengan adanya benturan dan kerancuan pemikiran yang ditanamkan kepada generasi muda (generasi melenial), tentang pertentangan antara agama dan Negara. Pada satu sisi mereka menyampaikan bahwa dalam kontekstualitas bernegara tidak perlu dikaitkan dan distandarkan kepada agama, agama hanya mengurus ranah ritual dan peribadatan semata, tidak perlu mengurus persoalan politik dan Negara. Namun kebanyakan ummat Islam berpandangan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Islam tidak dapat dipisahkan. Kelahiran dan kemajuan bangsa dan negeri ini senantiasa diisi oleh semangat juang dan kinerja ummat Islam. Oleh sebab itu, pemikiran yang ingin memisahkan agama dengan Negara kiranya tidak dapat diterima dan hidup di negeri ini.

Berbagai "penyakit" yang digambarkan di atas, hampir dapat dipastikan sebagai faktor yang dapat membawa krisis dan kehancuran bangsa ini, namun, jika dianalisis lebih jauh, maka segera akan diketahui bahwa berbagai "penyakit" yang bagai telah membudaya tersebut bukanlah penyebab awal terjadinya krisis dan kehancuran bangsa ini. Budaya korupsi, kolusi, nyabu, minum-minuman keras dan radikalisme ada penyebabnya. Penyebab awal adalah kualitas pendidikan agama dan akhlak (moral) anak bangsa yang rendah. Dekadensi moral yang sangat parah itulah sebagai salah satu faktor penyebab seseorang melakukan korupsi, kolusi, nyabu, minum-minuman keras dan radikal. Beranjak dari pernyataan ini, menunjukkan bahwa penyebab awal krisis adalah kemerosotan akhlak anak bangsa.

Kemerosotan akhlak anak bangsa ini tentunya juga ada penyebabnya. Diperkirakan, kualitas keimanan yang rendah merupakan penyebab utama merosotnya akhlak (moral) bangsa.⁶ Hal ini dapat dipahami, dimana keimanan merupakan faktor yang sangat urgent terhadap pembentukan mentalitas dan aktifitas seseorang. Tetapi, mengapa keimanan

⁴ <https://www.viva.co.id/berita/metro/93422>

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1037310/bnpt-potensi-radikalisme-masyarakat-indonesia-perlu-diwaspadai>

⁶ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rosda Karya, 1999, hal. 11.

masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim mengalami degradasi yang sangat drastis? Pertanyaan ini tentunya dapat ditelusuri dan ditemukan jawabannya dalam berbagai faktor. Satu diantaranya – yang diperkirakan sebagai akar dari seluruh penyebab krisis moral anak bangsa—ialah karena terdapat kesalahan format atau desain sistem pendidikan, dimana Pendidikan agama Islam tidak dijadikan core dalam kurikulum pendidikan nasional, sehingga pendidikan Islam tidak mengalami transformasi yang utuh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menghadapai problem tersebut memerlukan suatu langkah pemecahan yang mendasar dan akurat. Solusi alternatif terhadap permasalahan ini tampaknya tertuju pada upaya perbaikan dan menata ulang kembali paradigma, sistem dan orientasi pendidikan Islam sesuai dengan bingkainya. Beranjak dari upaya perbaikan dan penataan ulang sistem pendidikan Islam tersebut, arah dan transformasi pendidikan Islam di Indonesia dilakukan. Upaya ini pada akhirnya diharapkan akan tumbuh generasi muslim yang memahami dan mengamalkan Islam dengan benar, membumikan corak Islam moderat di tengah kehidupan masyarakat, dan menghilangkan paradigma pertentangan antara agama dan Negara, menuju harmonisasi dan kontribusi agama dalam pembangunan Negara. Sisi permasalahan inilah yang menjadi fokus kajian sepintas dalam artikel ini.

PEMBAHASAN

a. Hubungan Agama dan Negara

Islam merupakan agama yang universal, ia memuat hampir seluruh dimensi kehidupan manusia. Ajarannya tidak hanya mengandung persoalan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam, akan tetapi lebih dari itu. Islam secara teologis melalui simbol dan nilai yang dikandungkannya dapat hadir dimana-mana, ikut mempengaruhi dan bahkan membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi, politik dan kebijakan publik. Sementara pada tataran sosiologis, tidak jarang agama menjadi faktor penentu dalam proses transformasi dan modernisasi⁷ Jadi dapat dikatakan bahwa Islam melingkupi tiga unsur yaitu; agama (*al-din*), politik-pemerintahan (*daulah*) dan dunia (*al-duniya*). Namun menurut Azyumardi Azra⁸, bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (*al-din*) dengan politik (*siyasah*), politik merupakan bagian yang integral dari agama.

Khusus mengenai dimensi politik dan pemerintahan, Islam telah memberikan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai landasan etis dalam membangun konsep politik misalnya; keadilan, kesamaan, musyawarah, persaudaraan dan kebebasan⁹. Di samping itu, tak dapat dipungkiri bahwa konsep politik Barat ikut mempengaruhi dunia Islam. Di Barat pada akhir

⁷Bachtiar Effendy, *Masyarakat Beragama di Tengah Arus Sekularisasi*, Makalah yang dipresentasikan di Paramadina Seri Kelompok Kajian Agama (KKA) ke 119/TahunXII/1997, hal. 5.

⁸Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002, hal. 75.

⁹Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Negara: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Cet. I, Jakarta, LP3ES, 1984/1984, hal. 16. dan lihat juga Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Cet. I, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, hal. 69.

abad pertengahan terjadi pemisahan antara lembaga gereja pada satu sisi dan negara pada sisi lain. Paus Gelasius di abad XV mengemukakan; “*Berilah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, dan beri pula kepada Kaisar apa yang Kaisar punya*”. Kalimat yang pertama adalah wilayah rohani, sedangkan yang kedua adalah wilayah dunia.¹⁰

Sejak saat itu dimulai babak baru munculnya sekularisme di Barat, khusus dalam bidang politik dan pemerintahan. Bidang ini selanjutnya ikut berpengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial dan budaya. Akibatnya agama perlahan tapi pasti mulai dimarginalkan dalam ruh kehidupan umat manusia. Realitas tersebut kemudian berkembang di belahan dunia lain termasuk negara-negara Islam baik di kawasan Timur Tengah maupun Asia Tenggara, Indonesia juga termasuk di dalamnya.

Mencoba memahami konteks sekularisme di Barat dan konteks Islam di Timur mungkin dapat membantu untuk keluar dari cara pikir dikotomis yang naif. *Pertama*, dalam konteks Barat sekularisme adalah modus penyelesaian konflik antara otoritas lembaga negara di satu pihak melawan otoritas lembaga agama dalam tubuh Gereja di lain pihak. Dalam Islam, otoritas keagamaan seperti gereja, lebih-lebih gereja abad pertengahan yang monolitik dan sentralistik, tidak ditemukan. Bukan tidak ada otoritas sama sekali, akan tetapi dalam mainstream Islam otoritas itu terdesentralisasi sedemikian rupa pada pribadi-pribadi tokoh (ulama) atau pada organisasi-organisasi keagamaan yang satu sama lain bisa berbeda fatwa atau bahkan saling menolak. Oleh sebab itu, tidak pernah bisa dikatakan bahwa ada satu masa dalam sejarah Islam dimana negara (sultan) sepenuhnya berhadapan dengan otoritas agama (ulama). Juga tidak pernah terjadi sebaliknya, otoritas agama sepenuhnya ditaklukkan oleh otoritas Negara.¹¹

Kedua, dalam konteks Barat abad pertengahan, sekularisme yang berkonotasi menghukum otoritas agama dan mengurungnya di ruang privat, memang beralasan. Pada waktu itu, agama (baca: Gereja) telah menjadi instrumen dominatif bagi elite politik maupun ekonomi untuk mempertahankan privileginya. Pada saat yang sama, agama telah kehilangan watak profetiknyanya sebagai pembela masyarakat, khususnya petani dan buruh yang tertindas. Dosa-dosa dan kesalahan agama (gereja) yang terjadi di Barat tersebut juga terdapat dalam Islam. Akan tetapi, ada beberapa hal penting yang membedakan. Dalam Islam, seperti dikatakan di atas, tidak ada otoritas tunggal yang telah memainkan dosa-dosa itu secara utuh dan terpusat. Pada saat sebagian ulama Islam berkolusi dengan penguasa, mayoritas ulama tetap setia hidup di tengah-tengah dan bersama rakyat. Di antara mereka ada yang sekadar apatis (*uzlah*) dari politik kekuasaan, sebagian terus melancarkan kritik, bahkan beberapa dengan tindakan dan gerakan.¹²

Ketiga, dalam konteks kelahiran negara modern, ada juga fakta yang tidak boleh dilupakan. Di Barat negara modern lahir dari atau bebarengan dengan gerakan pemakzulan terhadap otoritas agama (gereja). Di Timur, di dunia Islam termasuk Indonesia, negara modern lahir justru dari semangat heroisme keagamaan (*kesyahidan*) untuk memerdekakan bangsanya dari tirani penjajahan, yang *notabene* adalah Barat. Itulah sebabnya hubungan

¹⁰Deliar Noer, *Islam dan Politik*, Cet. I; Jakarta, Yayasan Risalah 2003, hal. 136.

¹¹Masdar F. Mas'udi, *Meredefinisi Hubungan Agama dan Negara*, sebagaimana dikutip dari <http://www.icrp-online>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2007, hal. 6.

¹²Masdar F. Mas'udi, *Meredefinisi Hubungan ...*, hal. 7.

agama negara dalam abad modern di Timur umumnya dan di dunia Islam khususnya, tidak bisa begitu saja diacukan kepada pengalaman Barat dan dipecahkan dengan resep Barat, sekularisme itu. Tapi jangan salah. Dengan mengatakan begitu bukan berarti sekularisme musti kita tolak mentah dan kita kembali ke teokratisme, seperti usul kaum revivalis-fundamentalis. Kita tahu bahwa dalam teokratisme, secara formal negara ditaklukkan pada kepentingan agama, padahal kenyataannya ia ditaklukkan pada kepentingan elitnya belaka.¹³

Dengan demikian, mematrik negara hanya dalam kolom sekularis atau teokratis, kiranya terlalu menyederhanakan masalah. Lebih-lebih dalam konteks Islam, hubungan agama negara terlalu kompleks untuk dilihat secara hitam putih begitu saja. Di samping karena faktor kesejarahan yang berbeda dengan Barat, dalam konteks ajaran (normatif) mengkotakkan agama hanya pada ruang privat dan negara pada urusan publik juga mengandung mafsadah tersendiri. Bahkan di Barat pun sekularisme yang secara ketat memenjarakan agama di ruang privat sudah dikritik. Sikap cuci tangan agama terhadap derita kemanusiaan yang terjadi di ruang publik akibat kesewenang-wenangan negara (*state*) secara moral jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan. Telah muncul opsi baru yang oleh Jose Casanova disebut deprivatisasi agama. Gerakan teologi pembebasan di Amerika Latin maupun *political theology* di Eropa bagaimana pun merupakan refleksi dari kritik tersebut.

Sedangkan dalam Islam pertentangan antara kekuasaan penguasa politik dengan penguasa agama tidak ada, juga tidak mengenal penguasa agama. Islam tidak mempunyai sistem kependetaan, juga tidak mempunyai lembaga seperti gereja. Yang ada ialah agar dalam kehidupan apa pun juga, termasuk politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, nilai dan ajaran Islam senantiasa tegak.¹⁴ Meskipun demikian, menarik untuk menelaah pandangan Muhammad Abed al-Jabiri¹⁵ tentang hubungan antara agama, negara dan penerapan syariat Islam. Menurutnya, antara agama dan negara dalam sejarah tak pernah ada dikotomi. Pendikotomian tersebut hanya terjadi di Barat (terutama kekaisaran Romawi) ketika lembaga gereja yang dikuasai oleh kelompok pendeta. Kelompok pendeta ini kemudian yang menguasai negara. Sedangkan dalam Islam tak pernah terjadi seperti itu.

Oleh karena itu, relasi antara agama dan negara menjadi wacana yang cukup menarik sejak agama lahir sampai sekarang. Stabilitas sosial politik ikut mempengaruhi pasang-surut relasi antara agama dan negara. Nasr Hamid Abu Zaid¹⁶ mencatat bahwa lahirnya kelompok-kelompok kalam seperti Murjiah, Khawarij, Syiah, Jabariyah dan Qadariyah tak dapat dilepaskan dari pengaruh politik dan kekuasaan. Ketika situasi sosial politik membaik maka proses perkembangan agama ikut berjalan, sebaliknya jika ketika kondisi ini tidak stabil, maka hampir seluruh sendi kehidupan juga ikut terpuruk.

¹³Masdar F. Mas'udi, *Meredefinisi Hubungan ...*, hal. 8-9

¹⁴Deliar Noer, *Islam dan Politik*, Cet. I; Jakarta, Yayasan Risalah 2003, hal. 138.

¹⁵Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at Islam*, Terj. oleh Mujiburrahman, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2001, hal. 59.

¹⁶Nasr Hamid Abu Zaid, *Menalar Firman Tuhan: Wacana Majas dalam al-Qur'an Menurut Mu'tazilah*, Cet.I; Bandung, Mizan, 2003, hal. 30-55.

Relasi antara Islam dengan negara dalam konteks keindonesiaan menjadi diskursus yang cukup hangat dan menarik untuk diperbincangkan. Abdul Aziz Thaba¹⁷ menyimpulkan bahwa ada tiga priode hubungan Islam dan politik pasca kemerdekaan. *Pertama*, priode antagonistik (1967-1982). Pada masa ini, Islam bersifat melawan, ditandai dengan Partai Masyumi tidak berhasil dalam politik karena ditinggalkan oleh NU. Sebelumnya, kemenangan PNI dalam pemilu 1955 yang kemudian berkoalisi dengan PKI di parlemen. Disusul Muhammad Hatta gagal mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII). Parmusi yang dipimpin oleh Minteradja didirikan sebagai ganti dari Masyumi yang telah dibubarkan pemerintah. Masa ini banyak tokoh Islam dipenjara termasuk Hamka. Juga mengemuka beberapa persoalan misalnya; Undang-undang perkawinan yang diskenario oleh Ali Moertopo (penasehat presiden dari CSIS yang bergama Katolik), masalah aliran kepercayaan, azas tunggal pancasila diberlakukan –yang menyebabkan semua partai Islam; NU, PSII, Parmusi, Perti melakukan fusi menjadi PPP. Akibat tekanan ini muncul perlawanan dari umat Islam seperti; komando jihad 1970 dipimpin oleh Ismail Pranoto, Perjuangan Revolusi Islam Indonesia 1978 oleh A. Qadir Djaelani dan Dewan Revolusi Islam Indonesia 1980 dimotori oleh Muhammad Zein.

Pada priode ini menurut Dalier Noer¹⁸ kelemahan umat Islam dalam bidang politik terletak pada berpedaan pandangan. Perbedaan pandangan yang dimaksud adalah; 1) Golongan umat Islam yang memang aktif, disertai sikap menolak terhadap garis yang dianggap menyimpang. Masyumi dahulu berbuat demikian, dan kini ada golongan yang berbuat sama. Mereka tak ingin menyimpang. Bila perlu mereka berbuat menjauhi, menyendiri dan tidak turut berpolitik lagi namun mempunyai sikap; 2) Golongan yang bekerja sama dengan pihak penguasa, apapun yang terjadi, NU, PSII dan Perti di masa demokrasi terpimpin mencerminkan hal tersebut. Golongan dapat disebut kelompok akomodatif; 3) Golongan yang lebih memandang Islam sebagai ajaran masyarakat yang dirasa kurang atau tidak perlu disertai keterlibatan dalam politik; 4) Golongan yang sama sekali menolak sama sekali kaitan Islam dengan politik. Mereka berpendapat bahwa Islam tidak menyuruh umatnya membentuk negara; 5) Nurcholish Madjid termasuk dalam kategori ini dengan pernyataannya; Islam *yes*, partai Islam *no*.

Kedua, periode resiprokal-kritis (1982-1985), masa ini ditandai dengan proses saling mempelajari antara Islam dengan negara. Masa ini diawali dengan political test yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyodorkan konsep azas tunggal tahun 1982 untuk orsospol dan selanjutnya bagi semua ormas di Indonesia. Ide ini kemudian diperkuat dengan UU politik tahun 1985 yang menyebabkan reaksi cukup keras dari umat Islam. Tapi NU menerima ide tersebut pada Muktamar ke-27 di Situbondo 1984, disusul Muhammadiyah pada Muktamar ke-41 di Surakarta 1985 dan HMI menerima pada tahun yang sama, meskipun muncul HMI-MPO yang menolak pancasila. Depolitisasi yang dilakukan pemerintah mendapat reaksi cukup keras dari umat Islam sehingga muncul misal; kasus Tanjung Priok 1984 dipimpin oleh Amir Biki yang menewaskan 63 orang dan 100 luka-luka – saat itu Pangab ABRI yaitu LB. Moerdani--, kemudian juga terjadi penahanan aktivis Islam

¹⁷ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara: Hubungan Agama dan Politik Masa Orde Baru*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hal. 30.

¹⁸ Deliar Noer, *Islam dan Politik ...*, hal.114-116.

seperti AM. Fatwa (kini Wakil Ketua MPR dari PAN), Tony Ardy, Mawardi Noor. Mereka ditahan secara kejam tanpa proses hukum. Selain itu muncul gerakan; GPK Warsidi di Lampung 1989, Barisan Jubah Putih di Desa Blang Beuradeh, Beutung Ateuh, Aceh Barat, Mei 1987 yang dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah *Ketiga*, periode akomodatif (1983-1994), pemerintah sudah tidak mencurigai umat Islam kemudian semakin nampak kerjasama yang harmonis sehingga timbul istilah bahwa umat Islam berbulan madu dengan pemerintah. Orang diluar Islam mengatakan istilah *ijo royo-royo* (maksudnya langit Nusantara dihiasi oleh warna hijau sebagai simbol Islam). Selanjutnya muncul politik akomodasi yaitu struktural, legislatif, infrastruktur, dan kultural.¹⁹

Menurut Bakhtiar Effendi²⁰ setelah masa tersebut cendekiawan Muslim membentuk ICMI yang melahirkan politik akomodasi Islam yang cukup signifikan. Yaitu terjadinya proses pembaharuan teologis-keagamaan, reformasi politik dan birokrasi serta terjadi transformasi sosial. Perjuangan ICMI terhadap umat Islam sangat nampak ketika sejumlah kebijakan pemerintah mengeluarkan peraturan misalnya : Ditetapkannya KHI (Kompilasi Hukum Islam), dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri mengenai Badang Amil Zakat dan Shadaqah atau Bazis (1991), dihapuskannya larangan siswi-siswi Muslim mengenakan jilbab pada jam-jam sekolah (1991), Pelaksanaan Festival Kebudayaan Islam Istiqlal (1991 dan 1995), Pembentukan Bank Muamalat Indonesia (1992); dan penghapusan SDSB (Sumbangan dana Sosial Berhadiah) (1993).

Semakin membaiknya hubungan antara Islam dengan negara terus memperkuat posisi umat Islam, paling tidak jika dibanding sebelumnya. Hal ini ikut berpengaruh terhadap perkembangan Islam secara umum. Padahal umat Islam cenderung dimarginalkan oleh penguasa termasuk masa Soekarno dan Soeharto. Pada era reformasi ditandai dengan kebebasan berpendapat, dan berserikat maka kekuatan politik Islam semakin menemukan warnanya. Beberapa kebijakan pemerintah mencerminkan bahwa kekuatan Islam ikut mempengaruhinya. Misalnya dihapuskannya azas tunggal pancasila, partai Islam diperbolehkan menggunakan Islam sebagai ideologi, sekolah madrasah diakui statusnya dalam sistem pendidikan nasional, ditetapkannya UU zakat, UU haji dan beberapa hal yang lain. Namun pasca reformasi, terutama pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada upaya segelintir elit yang ingin membenturkan kembali keharmonisan anatara dimensi agama dengan negara, khususnya ingin memisahkan kembali aspek agama dalam implementasi politik dan kehidupan bernegara.

b. Peran Agama dalam Mewarnai Kebijakan Negara

Dalam studi agama, peranan agama dapat dicermati dalam dua perspektif, idealistik dan materialistik. Kedua perspektif masing-masing mewakili pandangan positif dan negatif (kalau tidak skeptis) terhadap peran agama. Sekalipun demikian, harus segera ditambahkan, bahwa usaha membagi pandangan terhadap agama kedalam dua perspektif saja sudah merupakan penyederhanaan persoalan. Hal ini, karena berbagai perspektif bisa ditempatkan di

¹⁹ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara...* hal.42-54.

²⁰ Bakhtiar Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1998, hal. 239-319,335.

antara kedua ekstrim ini. Perspektif yang menggabungkan keduanya bahkan bisa juga ditemukan. Marxisme, misalnya, dapat dipandang merepresentasikan perspektif materialistik, agama bahkan dipandang tidak lebih dari sekedar opini bagi masyarakat yang menyerah pada nasib. Hal ini terlihat dari pemikirannya yang mengatakan “Agama adalah nafas dari makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berhati, jika dari kebekuan yang tak bernyawa, candu masyarakat.”²¹

John Naisbit dan Patricia Abordene²² menggambarkan bahwa salah satu kecenderungan manusia di awal abad 21 ini adalah ketika manusia mulai kembali menengok hal-hal yang bersifat spritualistik atau agama. Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah, yang tidak yakin bahwa ada manusia yang pernah atau bakal dapat hidup tanpa agama, walaupun agama tersebut tidak mesti merupakan agama yang sama sekali baru. Ia bisa merupakan versi baru agama lain. Namun bila agama yang lama tetap dipertahankan, maka ia harus dihidupkan dalam bentuk yang mampu menjawab kebutuhan baru umat manusia, bisa jadi agama itu ditrasformasikan begitu radikal hingga nyaris tak dikenal lagi. Satu hal dapat difahami dari pernyataan Toynbee, bahwa bagaimanapun juga manusia masa depan tetap memerlukan agama. Agama tetap menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, dalam memecahkan persoalan-persoalamnya, walaupun agama tersebut bukan dalam bentuknya seperti sekarang.

Selain itu, Max Weber²³ menyimpulkan bahwa agama dapat dijadikan sebagai ideologi, yaitu ideologi yang menimbulkan perubahan. Dalam penelitiannya tentang etika protestan dan kapitalisme, Weber menyimpulkan “kapitalisme didasarkan pada perilaku rasional yang dilahirkan oleh kesalehan. Dalam protestan, iman adalah karunia Tuhan, dan manusia mampu membuktikan karunia Tuhan ini dengan tindakan kongkret. Memang benar, kerja keras bukan jaminan untuk keselamatan, tapi kerja keras mutlak diperlukan untuk membuktikan bahwa manusia memiliki keselamatan itu. Dengan alur pemikiran itu, orang Kristen menata hidupnya secara rasional membuang-buang waktu, misalnya, dipandang sebagai dasar. Demikian juga kemewahan kerja adalah panggilan Tuhan.

Roberth N. Bellah²⁴ mengakui bahwa Islam juga terbukti memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam proses perubahan sosial menuju peradaban yang gemilang. Bahkan Islam dinilai sebagai sebagai agama yang mampu berkomunikasi dengan realitas sosial yang dianggap baru sejak masa klasik sampai memasuki masa sekarang modern dan postmodern. Sementara, jika agama dijadikan sebagai pilar dan spirit dalam menerapkan kebijakan publik maka nilai-nilai luhur agama akan tercipta sebuah tatanan masyarakat yang berperadaban (*citizen*) atau masyarakat madani (*civil, tamaddun, dan mutamaddun*). Yaitu sebuah masyarakat yang damai, tentram dan sejahtera, seperti masyarakat yang telah dibangun oleh Rasulullah di Madinah.²⁵

²¹Djohn Effendi, Djohn Efendi, *Pengantar dalam Huston Smith, Agama-Agama Manusia*, (Terj) Saifroedin Bahar, Cet. VI, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001, hal. x.

²²John Naisbit dan Patricia Abordene, *Mega Trends 2000*, Cet. I, Bandung, Mizan, 2000, hal. 12.

²³Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Surabaya, Pustaka Prometheus, 2000, hal. 45.

²⁴Roberth N. Bellah, *Beyoung Belief: Menemukan Kembali Agama: Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern*, Jakarta, Paramadina, 2000, hal.40.

²⁵Andi Faisal Bakti, *Good Government dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman* dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (Editor), *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta, Paramadina, 2005, hal. 329.

Dalam konteks lebih luas terciptanya masyarakat yang madani dapat juga dilihat dari pelaksanaan pemeritahan yang bersih (*clean governance*) dari hal-hal yang tidak sesuai nilai-nilai Islam. Misalnya menjunjung tinggi keadilan dan demokrasi (*syura*) serta tidak melakukan korupsi. Implementasi dari nilai-nilai keislaman yang luhur dari dilihat dengan sikap amanah dan ikhlas serta bermusyawarah dalam melakukan segala hal.

Amanah adalah sifat seseorang yang apabila disertai tanggungjawab maka dia akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah. Pembicaraan tentang pembangunan tidak dapat terlepas dari politik (kekuasaan Negara). Oleh sebab itu, tidak tepat mempertentangkan antara politik dan pembangunan, karena pembangunan itu, sejauh yang bersangkutan dengan tujuan, pendekatan, pangkal tolak serta isi yang dikandungnya, merupakan keputusan politik. Maka keputusan tidak terlepas pada satu orang saja. Apalagi bagi kehidupan dan kepentingan bersama diperlukan musyawarah. Perlu dicatat bahwa pembangunan hanya akan berhasil bila sebanyak mungkin rakyat untuk berpartisipasi. Disinilah letak pentingnya musyawarah dalam proses pengambilan kebijakan Negara.

Musyawarah merupakan cermin penghargaan terhadap suara dan pendapat orang lain, termasuk mendengarkan suara dari kelompok masyarakat kecil dan termarginalkan oleh sistem. Langkah tersebut akan melahirkan pembangunan negara yang aspiratif dan emansipatoris (*botton up*), tidak memaksa atau otoriter (*top down*). Kemudian dalam proses pengambilan kebijakan tersebut setiap orang harus memiliki sifat ikhlas, yang apabila seseorang memiliki sifat tersebut maka dia bekerja tidak hanya mengejar materi dan harta semata-mata.

Lebih lanjut apabila pemerintah mampu menerapkan nilai-nilai Islam tersebut, maka akan melahirkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* atau pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Pemerintahan yang bersih ini tercermin dari penampilan dan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, setara dan transparan, serta bertanggungjawab.²⁶

Realitas tersebut menunjukkan bahwa betapa Islam yang telah mengakar kuat dalam masyarakat tidak dapat dipinggirkan walaupun dengan kekuatan politik sekuat apapun. Sebuah negara yang mayoritas Islam dan mengakar secara kuat nilai-nilainya tidak dapat paksakan untuk menghilangkan ruh keislaman pada masyarakatnya. Hal ini juga membuktikan bahwa antara Islam dan negara tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, juga dapat dikatakan bahwa Islam akan tetap mampu menjadi warna dalam proses kebangkitan sebuah bangsa dan negara.

c. Tranformasi Pendidikan Agama Islam dalam Pembangunan Negara

Agama memberi pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter, pandangan hidup dan budaya masyarakat. Ada dua dimensi keberagamaan yang memiliki keterkaitan dalam kehidupan para umat pemeluk agama yakni (1) Agama oleh pemeluknya dijadikan sebagai pandangan hidup yang menjelaskan keberadaan manusia di dunia, menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia, (2) Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan

²⁶Deliar Noer, *Islam dan Politik ...*, hal. 330.

Tuhan, tetapi juga mengatur kehidupan manusia antara sesama manusia dan juga dengan makhluk Tuhan lainnya.²⁷ Agama sebagai keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol dari tindakan-tindakan anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.

Sebagai contoh kongkrit peran agama dalam mewarnai kebijakan negara dapat dilihat dalam sejarah kerajaan Aceh antara agama dan adat tidak dapat dipisahkan. Agama sangat berperan dalam membentuk adat dan budaya Aceh sehingga dalam *hadih majah* disebutkan; *hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut* (artinya; agama dan adat bagaikan zat dan sifat). Dalam versi lain dikatakan *hukom ngon adat lagee mata hitam ngon mata putih, hukom-hukom Allah, adat adatollah*, artinya hukum dengan adat ibarat mata hitam dengan mata putih, hukum adalah hukum Allah dan adat adalah adat Allah²⁸

Penegasan ini lebih jauh dijelaskan dalam kitab *Tazkirat al-Rakidin* karya ulama besar Syaikh Muhammad ibnu Abbas (1307H/1889 M) sebagaimana dikutip oleh Teuku Ibrahim Alfian²⁹ dalam kitab itu dikemukakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut:

- 1) Dalam alam ini terdapat tiga macam raja, yaitu raja yang memegang jabatan lahir saja, yaitu yang memerintah rakyat menurut hukum adat kebiasaan dunia elite adat, raja yang memerintah jalan agama, yaitu ulama ahlu-syar`i elite agama, dan rasul serta anbiya.
- 2) Kita wajib mengikuti perintah raja yang memerintah menurut hukum adat, jika perintahnya sesuai dengan hukum syara`.
- 3) Kita wajib mengikuti suruhan ahlu-syari`ah, jika tidak, maka kita akan ditimpa malapetaka.
- 4) Hukum adat dan hukum agama adalah sama kembar; takkala mufakat hukum adat dengan hukum syara` negeri senantiasa tiada huru hara.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa betapa Islam yang telah mengakar kuat dalam masyarakat tidak dapat dipinggirkan walaupun dengan kekuatan politik sekuat apapun. Sebuah negara yang mayoritas Islam dan mengakar secara kuat nilai-nilainya tidak dapat dipaksakan untuk menghilangkan ruh keislaman pada masyarakatnya. Hal ini juga membuktikan bahwa antara Islam dan negara tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, juga dapat dikatakan bahwa Islam akan tetap mampu menjadi warna dalam proses kebangkitan sebuah bangsa.

Jika dianalisis secara mendalam ada dua modal besar yang mendukung penerapan nilai-nilai agama dalam mewarnai pembangunan di Indonesia. Kedua modal tersebut adalah; a) modal kultural berupa adat dan budaya yang begitu kental dengan nilai-nilai agama; b)

²⁷Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Paramadinah, 2001: 117.

²⁸ Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*. Banda Aceh: Gua Hira, 2004, hal. 22.

²⁹ Ibrahim Alfian, *Cendekiawan dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh Sebuah Pengamatan Permulaan*, dalam Alfian (ed. 1977), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jakarta: LP3ES. 1997, hal. 159-160,

modal struktural, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 yang secara yuridis dan konstitusional mengandung nilai-nilai keagungan yang lahir dari substansi nilai keislaman dan keagamaan yang universal. Dengan demikian, diharapkan jika kedua modal tersebut dapat bersinergis dan dijalankan secara baik, maka akan tercipta sistem pemerintahan yang baik. Di samping itu aparatur pemerintahan sebagai orang yang terlibat secara langsung dalam proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai tersebut juga akan terdorong untuk melakukan aktifitas yang sesuai dengan ajaran Islam pula. Implikasi lebih jauh yang dapat dikemukakan adalah akan tercipta sebuah pemerintahan yang baik (*good governant*) yang bersih (*clean governant*).

Menurut Reyhan Adiel pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat melakukan proses koordinasi, pengendalian, dan penyeimbangan antara pemerintah dengan yang rakyat di dalam pemerintahan tersebut. Pemerintah dapat menjunjung tinggi nilai keinginan atau kehendak rakyat, yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat mencapai kemandirian, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan menjunjung tinggi keadilan di dalam lingkungan masyarakat. Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan cerminan dari sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, pendidikan, hukum, serta ekonomi. Pemerintahan yang bersih ini tercermin dari penampilan dan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, setara, transparan, bertanggungjawab, tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang. Aparatur pemerintah yang menegakkan keadilan, menegakkan supremasi hukum, ikhlas, jujur, amanah dan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia.³⁰

Gambaran dari pemerintahan yang baik dan bersih tersebut kiranya menjadi model dan cita-cita bersama yang harus diwujudkan oleh pemerintahan Indonesia. Untuk mencapai tujuan yang mulia ini, pemerintah harus membuat sistem, kebijakan dan program kerja --baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang--, yang dapat menunjang tumbuh dan berkembangnya suatu tatanan pemerintahan yang baik dan bersih dimaksud. Ketiga aspek tersebut hendaknya menjadi prioritas dan agenda utama yang harus segera dilakukan.

Sistem pemerintahan yang dijalankan haruslah menggambarkan suatu tatanan sistem pemerintahan modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, serta dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sendiri. Tatanan pemerintahan yang dijiwai dan dihiasi dengan berbagai sistem nilai tersebut, akan membentuk suatu sistem pemerintahan yang dinamis, demokratis, egaliter, transparan, dan kuat. Sementara kebijakan pemerintah yang dirumuskan dan dilaksanakan harus juga sejalan dengan paradigma dan sistem pemerintahan yang baik dan bersih tersebut. Pada sisi lain, secara substansial setiap kebijakan pemerintah memberi ruang yang luas bagi penerapan nilai-nilai agama dalam sistem dan tatanan pemerintahan.

Begitu pula kiranya dengan program kerja yang akan dilaksanakan mestilah sesuai dan mengacu pada sistem dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya seluruh program kerja yang telah disusun, baik berupa program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang, merupakan suatu jalan untuk mewujudkan cita-cita luhur dalam rangka pencapaian

³⁰ Deliar Noer, *Islam dan Politik ...*, hal. 330.

pemerintahan yang baik, bersih, aman dan sejahtera sebagaimana tertuang dalam sistem dan kebijakan di atas. Apabila ke tiga aspek ini, sistem, kebijakan dan program kerja tersebut dapat berjalan dengan sinergis, maka harapan akan terbentuk masyarakat Indonesia yang agamis, modern, sejahtera, bermartabat dan berpradaban bukanlah menjadi impian belaka, namun kiranya dapat tercapai pada masa depan.

Terealisasinya kondisi Indonesia yang digambarkan di atas, perlu upaya dan usaha yang sungguh-sungguh dan sistematis dari semua anak bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah bidang pendidikan. Dalam kaitan ini, perlu dilakukan transformasi pendidikan Islam dalam struktur pembangunan negara Indonesia. Transformasi pendidikan Islam dapat diimplementasikan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Pendidikan Agama harus dijadikan inti dalam kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan agama yang berorientasi pada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu dijadikan core kurikulum nasional, terutama dalam mengantisipasi krisis moral atau akhlak, termasuk di dalamnya meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu kekeliruan kebijakan pendidikan Nasional yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pendidikan (*educational performance*) Indonesia adalah pendidikan agama (khususnya pendidikan agama Islam) tidak menjadi substansi dalam kurikulum nasional dan kurang diperhitungkannya lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional. Sudah saatnya pemerintah membuat regulasi dan kebijakan dalam bidang politik pendidikan nasional, dimana ajaran agama menjadi muatan utama yang harus diisi dalam kurikulum nasional, guna menguatkan keimanan, ketakwaan dan moral masyarakat.³¹
- b. Pendidikan agama di sekolah dan Perguruan tinggi harus diajarkan oleh guru dan dosen yang mumpuni dan professional. Pemerintah dan pihak terkait harus melakukan evaluasi dan sekaligus membuat regulasi yang mengatur tentang keberadaan guru dan dosen yang mengajarkan pendidikan agama bagi para siswa dan mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para guru dan dosen yang ditugaskan untuk mengajarkan anak-anak generasi penerus bangsa, betul-betul para guru dan dosen yang memiliki kemampuan ilmu agama yang baik, ahli ibadah dan memiliki moral dan keteladanan yang tinggi. Bukan sebaliknya, para guru dan dosen yang kurang menguasai ilmu agama, lemah dalam beribadah dan tidak memiliki akhlak yang baik serta tidak dapat dijadikan sebagai contoh teladan dalam aktifitas kesehariannya.
- c. Implementasi Materi pendidikan agama harus disesuaikan dengan kebutuhan dan usia peserta didik. Untuk menghindari munculnya radikalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa, maka langkah konkrit yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran adalah menyesuaikan materi pendidikan agama yang diajarkan dengan kebutuhan peserta didik dan usia mereka. Bagi anak-anak sekolah rendah dan sekolah menengah atau yang baru belajar agama, maka ajarkanlah kepada mereka materi-materi ajaran agama yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Hindarkanlah

³¹Sulaiman Ibrahim, *Menata pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Irfani, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014, hal. 108.

mengajarkan materi-materi siyasah (politik) kepada mereka yang baru saja mendalami ajaran agama. Setelah mereka menguasai materi-materi pokok dan telah dimalakan dengan baik, baru diperbolehkan mengajarkan persoalan-persoalan siyasah, politik, kenegaraan dan lain sebagainya, karena mereka sudah siap secara mental dan juga telah memiliki wawasan yang luas. Konsekuensi logis ini dapat menghindarkan para generasi penerus bangsa terjerumus dalam lingkaran radikalisme yang hari ini mulai meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

SIMPULAN

Perpaduan dimensi agama dan negara secara utuh dapat melahirkan pemerintahan yang kuat, bersih dan maju. Keberadaan agama dalam tatanan pemerintahan Indonesia bukanlah suatu hal yang dipermasalahkan, namun sebaliknya ia menjadi modal dasar bagi pembangunan itu sendiri. Setidaknya ada dua modal besar yang menjadi pilar dalam pembangunan Indonesia dewasa ini, yaitu; a) modal kultural, adat dan budaya yang sangat kental dengan warna Islam; b) modal struktural, keberadaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Kedua modal tersebut menjadi dasar bagi pemerintahan Indonesia dalam merumuskan sistem, kebijakan dan program kerjanya.

Sistem pemerintahan yang dijalankan haruslah menggambarkan suatu tatanan sistem pemerintahan modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, serta dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sendiri. Tatanan pemerintahan yang dijiwai dan dihiasi dengan berbagai sistem nilai tersebut, akan membentuk suatu sistem pemerintahan yang dinamis, demokratis, egaliter, transparan, dan kuat. Sementara kebijakan pemerintah yang dirumuskan dan dilaksanakan harus juga sejalan dengan paradigma dan sistem pemerintahan yang baik dan bersih tersebut. Pada sisi lain, secara substansial setiap kebijakan pemerintah memberi ruang yang luas bagi penerapan nilai-nilai agama dalam sistem dan tatanan pemerintahan.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka langkah kongkrit yang harus dilakukan adalah perbaikan dan menata ulang kembali paradigma, sistem dan orientasi pendidikan Islam sesuai dengan bingkainya. Pendidikan agama Islam harus dijadikan core dalam kurikulum pendidikan nasional, sehingga pendidikan Islam mengalami transformasi yang utuh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara komprehensif dan sistematis transformasi pendidikan Islam dapat dilakukan melalui tahapan: 1) Pendidikan Agama harus dijadikan inti dalam kurikulum pendidikan nasional, dan substansi ajaran agama tidak harus dipertentangkan dalam kehidupan bernegara. 2) Pendidikan agama di sekolah dan Perguruan tinggi harus diajarkan oleh guru dan dosen yang mumpuni dan profesional, dan 3) Implementasi materi pendidikan agama harus disesuaikan dengan kebutuhan dan usia peserta didik

DAFTAR PUSTAKA

- Abid al-Jabiri, Muhammad. *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at Islam*, Terj. oleh Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Abu Zaid, Nasr Hamid. *Menalar Firman Tuhan: Wacana Majas dalam al-Qur'an Menurut Mu'tazilah*, Cet.I; Bandung: Mizan, 2003.
- Alfian, Ibrahim. Cendekiawan dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh Sebuah Pengamatan Permulaan", dalam Alfian (ed. 1977), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jakarta: LP3ES. 1997.
- Anshari, Endang Saifuddin *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Azra, Azyumardi. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Badruzzaman, *Upaya Pelestarian Pantun Seumapa*, Makalah disampaikan pada diskusi Keanekaragaman Budaya. Banda Aceh, Balai Kajian Sejarah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004.
- Bakti, Andi Faisal. *Good Government dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman* dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (Editor), *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Efendi, Djohn. *Pengantar* dalam Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, (Terj) Safroedin Bahar, Cet. VI, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Effendi, Bachtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Effendy, Bachtiar. *Masyarakat Beragama di Tengah Arus Sekularisasi*, Makalah yang dipresentasikan di Paramadina Seri Kelompok Kajian Agama (KKA) ke 119/TahunXII/1997.
- F. Mas'udi, Masdar. *Meredefinisi Hubungan Agama dan Negara*, sebagaimana dikutip dari <http://www.icrp-online>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2007.

<https://nasional.tempo.co/read/1037310/bnpt-potensi-radikalisme-masyarakat-indonesia-perlu-diwaspadai>.

<https://regional.kompas.com/read/2017/11/02/17045461/buwas-indonesia-darurat-narkoba-sejak-1971-sampai-sekarang>.

Ibrahim, Sulaiman. *Menata pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Irfani, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014.

Ismail, Badruzzaman. *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*. Banda Aceh: Gua Hira, 2004.

Madjid, Nurcholis. *Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Paramadinah, 2001.

Mujiburrahman, *Urgensi Perguruan Tinggi Dalam Pembentukan Karakter Bangsa*, Jurnal Mudarrisuna, vol. 6, No 1, 2016.

N. Bellah, Roberth. *Beyoung Belief: Menemukan Kembali Agama: Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern*, Jakarta: Paramadina, 2000.

Naisbit, John dan Patricia Abordene, *Mega Trends 2000*, Cet. I, Bandung : Mizan, 2000.
Noer, Deliar. *Islam dan Politik*, Cet. I; Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.

Noer, Deliar. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*, Terj. oleh Adul Hayyei al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Syafii Maarif, Ahmad. *Islam dan Negara: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Cet. I, Jakarta: LP3ES, 1984.

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Rosda Karya, 1999.

Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara: Hubungan Agama dan Politik Masa Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Weber, Max. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000.